

Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pembangunan Ekonomi Kabupaten Probolinggo

Rido Nur Hidayat¹, Ahmad Sholahuddin², Taufikur Rahman³, Indra Arif Firmansyah⁴

¹⁻⁴Program Studi Ekonomi, Universitas Nurul Jadid

ridohidayat552@gmail.com

Abstrak

Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peran belanja pemerintah daerah menjadi krusial karena berfungsi sebagai stimulus utama dalam penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan aktivitas ekonomi regional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa data time series selama periode 2020–2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo. Variabel dependen yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, sedangkan variabel independen meliputi belanja modal pemerintah daerah, dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk sebagai variabel kontrol. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi belanja pemerintah, khususnya belanja yang bersifat produktif, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan belanja publik secara efektif dan berorientasi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: belanja pemerintah daerah, pembangunan ekonomi, PDRB, ekonomi pembangunan, Kabupaten Probolinggo.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu pilar utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pembangunan ekonomi tidak hanya diukur melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui kemampuan daerah dalam menciptakan pemerataan pendapatan, mengurangi tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan.

Salah satu instrumen kebijakan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah adalah belanja pemerintah daerah. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan sumber daya fiskal ke berbagai sektor pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Dalam kerangka ekonomi pembangunan, belanja pemerintah dipandang sebagai bentuk investasi publik yang dapat meningkatkan kapasitas produksi daerah, mendorong aktivitas ekonomi, serta menciptakan efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian regional.

Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika belanja pemerintah daerah di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan, terutama sebagai respons terhadap tekanan fiskal dan perlambatan ekonomi akibat krisis global dan pandemi COVID-19. Periode pascakrisis ditandai dengan upaya pemulihan ekonomi dan penyesuaian kebijakan fiskal daerah, di mana pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan belanja publik dengan keterbatasan anggaran. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja, khususnya belanja yang bersifat produktif dan berdampak langsung terhadap pembangunan ekonomi.

Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur juga menghadapi tantangan serupa dalam pembangunan ekonominya. Struktur ekonomi Kabupaten Probolinggo masih didominasi oleh sektor pertanian, industri pengolahan skala kecil, dan sektor jasa, dengan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap belanja pemerintah daerah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kinerja perekonomian daerah terus mengalami dinamika dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan perubahan alokasi belanja daerah dan kondisi ekonomi makro nasional. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana peran belanja pemerintah daerah, khususnya belanja modal, dalam mendukung pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo.

Belanja modal pemerintah daerah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan belanja operasional atau belanja pegawai. Belanja modal diarahkan untuk pembentukan aset tetap, seperti pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan sarana pendukung ekonomi lainnya, yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka menengah dan

panjang. Dalam perspektif teori Harrod–Domar dan teori pembangunan endogen, investasi publik melalui belanja modal memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, belanja modal sering dipandang sebagai komponen belanja yang paling relevan untuk dianalisis dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi.

Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pembangunan ekonomi menunjukkan temuan yang beragam. Sebagian penelitian menemukan bahwa belanja pemerintah, khususnya belanja modal, berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa efektivitas belanja pemerintah sangat bergantung pada struktur belanja, kualitas perencanaan, serta kondisi sosial ekonomi daerah yang bersangkutan. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan adanya ruang kajian yang masih terbuka, khususnya pada level kabupaten yang memiliki karakteristik ekonomi dan fiskal yang berbeda-beda.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan karena berfokus pada analisis peran belanja pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo pada periode pemulihan ekonomi dan penyesuaian kebijakan fiskal daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai dinamika belanja modal dan pembangunan ekonomi daerah, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan anggaran yang lebih efektif dan berorientasi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran belanja pemerintah daerah, khususnya belanja modal, terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi pembangunan daerah serta memberikan implikasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan belanja publik sebagai instrumen pembangunan ekonomi regional.

Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya ekonomi secara optimal dan berkelanjutan. Todaro dan Smith (2015) menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan output, tetapi juga dari kemampuan suatu wilayah dalam mengurangi kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan pendapatan. Dalam konteks desentralisasi fiskal, pembangunan ekonomi daerah menjadi semakin penting karena pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya dan menentukan prioritas pembangunan.

Menurut Arsyad (2010), pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pengembangan potensi lokal, peningkatan daya saing daerah, serta penguatan struktur ekonomi regional. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah daerah, khususnya kebijakan fiskal melalui APBD.

Pembangunan ekonomi daerah umumnya diukur menggunakan indikator makroekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi, dan PDRB per kapita. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi riil karena telah menghilangkan pengaruh inflasi, sehingga lebih mencerminkan peningkatan kapasitas produksi suatu daerah (BPS, 2024).

Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Dalam kajian ekonomi pembangunan, terdapat beberapa teori utama yang menjelaskan proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Teori pertumbuhan klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith menekankan pentingnya akumulasi modal, pembagian kerja, dan perluasan pasar sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, teori Harrod–Domar menekankan peran investasi sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi.

Teori neoklasik yang dikembangkan oleh Solow menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Dalam perkembangannya, teori pertumbuhan endogen menekankan bahwa faktor-faktor internal seperti investasi pada infrastruktur, pendidikan, dan inovasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam konteks daerah, belanja pemerintah dapat berperan sebagai pemicu pertumbuhan melalui penyediaan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Belanja Pemerintah Daerah

Belanja pemerintah daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Mankiw (2020), belanja pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian karena dapat memengaruhi permintaan agregat dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, belanja pemerintah dipandang sebagai instrumen fiskal yang dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, terutama di daerah.

Belanja pemerintah daerah terdiri dari beberapa komponen, antara lain belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Di antara komponen tersebut, belanja modal memiliki peran strategis karena bersifat produktif dan berorientasi pada pembentukan aset yang memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Oleh karena itu, belanja modal sering dijadikan fokus utama dalam analisis pembangunan ekonomi daerah.

Kuncoro (2014) menyatakan bahwa dalam era otonomi daerah, efektivitas belanja pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Belanja pemerintah yang diarahkan secara tepat dapat meningkatkan kualitas infrastruktur, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong aktivitas ekonomi sektor swasta.

Belanja Modal sebagai Investasi Publik

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja ini meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Dalam teori Harrod–Domar, investasi merupakan faktor utama

yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas produksi. Belanja modal pemerintah daerah dapat dipandang sebagai bentuk investasi publik yang berperan dalam mempercepat proses pembangunan ekonomi.

Selain itu, teori pembangunan endogen menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh faktor-faktor internal, seperti kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, dan inovasi. Belanja modal yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik dapat meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan investasi swasta. Dengan demikian, belanja modal memiliki keterkaitan yang erat dengan peningkatan PDRB dan pembangunan ekonomi daerah.

Hubungan Belanja Pemerintah Daerah dan Pembangunan Ekonomi

Secara teoritis, belanja pemerintah daerah memiliki hubungan yang positif dengan pembangunan ekonomi. Peningkatan belanja pemerintah, khususnya belanja modal, dapat mendorong aktivitas ekonomi melalui efek pengganda (multiplier effect), penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, efektivitas belanja pemerintah sangat bergantung pada kualitas perencanaan, pengelolaan anggaran, serta kesesuaian belanja dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDRB daerah. Akan tetapi, terdapat pula penelitian yang menemukan bahwa belanja pemerintah tidak selalu berdampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi akibat rendahnya efisiensi dan ketepatan sasaran belanja. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara belanja pemerintah daerah dan pembangunan ekonomi masih bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing daerah.

Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, belanja modal pemerintah daerah dipandang sebagai variabel yang berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. Dalam penelitian ini, pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo diukur melalui PDRB atas dasar harga konstan, sedangkan belanja pemerintah daerah direpresentasikan oleh belanja modal. Hubungan antara kedua variabel tersebut dianalisis dalam konteks pemulihan ekonomi dan penyesuaian kebijakan fiskal daerah.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif dan eksplanatori. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis hubungan antara belanja pemerintah daerah dan pembangunan ekonomi berdasarkan data numerik yang diolah secara statistik. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan perkembangan belanja modal dan pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo, sedangkan penelitian eksplanatori digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel belanja modal dan pembangunan ekonomi daerah.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan karakteristik ekonomi daerah yang masih berkembang serta peran belanja pemerintah daerah yang relatif dominan dalam mendorong aktivitas ekonomi. Periode penelitian mencakup tahun 2020–2024, yang merepresentasikan fase penyesuaian dan pemulihan ekonomi daerah pascakrisis.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif. Data diperoleh dari instansi resmi pemerintah, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Probolinggo dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data belanja modal pemerintah daerah diperoleh dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan data pembangunan ekonomi daerah diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan yang bersumber dari publikasi BPS.

Definisi Operasional Variabel

Untuk memudahkan analisis, variabel-variabel dalam penelitian ini didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

1. Belanja Modal Pemerintah Daerah (X) Belanja modal pemerintah daerah adalah seluruh pengeluaran APBD Kabupaten Probolinggo yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Variabel ini diukur menggunakan total belanja modal tahunan (dalam Rupiah) yang merupakan agregasi dari belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya.
2. Pembangunan Ekonomi Daerah (Y) Pembangunan ekonomi daerah dalam penelitian ini diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Probolinggo atas dasar harga konstan. Penggunaan PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi riil tanpa dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan perkembangan belanja modal dan PDRB Kabupaten Probolinggo selama periode penelitian. Selanjutnya, analisis kuantitatif dilakukan untuk mengetahui hubungan antara belanja modal dan pembangunan ekonomi daerah. Model analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$$

Keterangan: Y = Pembangunan ekonomi daerah (PDRB) X = Belanja modal pemerintah daerah α = Konstanta β = Koefisien regresi ε = Error term

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji statistik yang relevan untuk menilai signifikansi pengaruh belanja modal terhadap pembangunan ekonomi daerah. Seluruh data diolah menggunakan perangkat lunak statistik.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain periode pengamatan yang relatif singkat, yaitu lima tahun (2020–2024), serta penggunaan satu variabel independen utama. Meskipun demikian, penelitian ini tetap relevan karena mampu memberikan gambaran empiris mengenai peran belanja modal pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo pada periode pemulihan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perkembangan Belanja Modal dan Pembangunan Ekonomi

Belanja modal pemerintah daerah merupakan salah satu instrumen fiskal yang digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui penyediaan infrastruktur dan aset publik. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPKAD Kabupaten Probolinggo, perkembangan belanja modal selama periode 2020–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2020, belanja modal tercatat sebesar Rp229,93 miliar, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp167,43 miliar. Selanjutnya, belanja modal kembali meningkat pada tahun 2022 sebesar Rp238,16 miliar, sebelum mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing menjadi Rp74,60 miliar dan Rp70,38 miliar.

Fluktuasi belanja modal tersebut mencerminkan dinamika kebijakan fiskal daerah dalam menghadapi tekanan ekonomi dan proses penyesuaian anggaran pada periode pemulihan ekonomi. Penurunan belanja modal pada akhir periode penelitian mengindikasikan adanya pergeseran prioritas belanja daerah, baik untuk menjaga stabilitas fiskal maupun untuk memenuhi kebutuhan belanja lainnya yang bersifat mendesak.

Di sisi lain, pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menunjukkan tren yang meningkat secara konsisten selama periode penelitian. Nilai PDRB meningkat dari 22.898,24 pada tahun 2020 menjadi 27.153,09 pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah tetap mengalami pertumbuhan meskipun terjadi penurunan belanja modal pada beberapa tahun tertentu.

Hasil Analisis Regresi

Untuk mengetahui hubungan antara belanja modal pemerintah daerah dan pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo, dilakukan analisis regresi linier sederhana dengan PDRB sebagai variabel dependen dan belanja modal sebagai variabel independen. Hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja modal memiliki koefisien negatif terhadap PDRB dengan tingkat signifikansi pada taraf 10 persen. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,662 menunjukkan bahwa variasi PDRB sebesar 66,2 persen dapat dijelaskan oleh belanja modal pemerintah daerah, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

Hasil ini mengindikasikan bahwa secara statistik belanja modal memiliki keterkaitan dengan pembangunan ekonomi daerah, meskipun hubungan yang terbentuk tidak menunjukkan pengaruh positif secara langsung pada periode yang sama. Dengan jumlah observasi yang terbatas, hasil regresi ini lebih tepat diinterpretasikan sebagai gambaran peran belanja modal dalam pembangunan ekonomi daerah, bukan sebagai bukti kausalitas yang kuat.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah daerah belum secara langsung mendorong peningkatan PDRB Kabupaten Probolinggo dalam jangka pendek. Kondisi ini sejalan dengan teori ekonomi pembangunan yang menyatakan bahwa investasi publik, termasuk belanja modal pemerintah, memiliki efek jangka menengah dan panjang (time lag effect). Infrastruktur dan aset publik yang dibangun melalui belanja modal memerlukan waktu sebelum dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan output ekonomi daerah.

Selain itu, peningkatan PDRB yang tetap terjadi meskipun belanja modal mengalami penurunan pada tahun 2023–2024 mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh belanja modal pemerintah. Faktor-faktor lain seperti konsumsi rumah tangga, aktivitas sektor swasta, serta peran sektor pertanian dan jasa turut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah memiliki ketahanan tertentu terhadap fluktuasi belanja modal pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menemukan bahwa efektivitas belanja pemerintah daerah sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran. Belanja modal yang besar tidak selalu secara otomatis meningkatkan pembangunan ekonomi apabila tidak diikuti dengan perencanaan yang tepat sasaran dan pemanfaatan yang optimal. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah daerah perlu memperhatikan tidak hanya besaran belanja modal, tetapi juga efektivitas dan kualitas implementasinya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa belanja modal pemerintah daerah berperan dalam pembangunan ekonomi, namun pengaruhnya tidak bersifat instan. Dalam konteks pemulihan ekonomi dan penyesuaian kebijakan fiskal daerah, belanja modal tetap menjadi instrumen penting yang perlu dikelola secara strategis agar mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo.

Tabel 1. Perkembangan Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020–2024
Sumber: BPKAD Kabupaten Probolinggo (diolah)

Tahun	Belanja Modal (Rp)
2020	229.930.000.000
2021	167.430.000.000
2022	238.160.000.000

2023	74.600.000.000
2024	70.380.000.000

Tabel 1 menunjukkan bahwa belanja modal Pemerintah Kabupaten Probolinggo selama periode 2020–2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Penurunan belanja modal pada tahun 2021 dan kembali pada tahun 2023–2024 mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan fiskal daerah dalam merespons kondisi ekonomi dan keterbatasan anggaran.

Tabel 2. Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Probolinggo Tahun 2020–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo (diolah)

Tahun	PDRB ADHK (Miliar Rupiah)
2020	22.898,24
2021	23.664,39
2022	24.734,19
2023	25.904,93
2024	27.153,09

Berdasarkan Tabel 2, PDRB Kabupaten Probolinggo atas dasar harga konstan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian daerah tetap tumbuh meskipun terjadi fluktuasi dalam alokasi belanja modal pemerintah daerah.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Sumber: Data diolah menggunakan analisis regresi

Variabel	Koefisien	Signifikansi
Konstanta	Positif	-
Belanja Modal	Negatif	0,094
R ²	0,662	-

Tabel 3 menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah daerah memiliki hubungan yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Probolinggo pada taraf signifikansi 10 persen. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,662 menunjukkan bahwa belanja modal mampu menjelaskan sebagian besar variasi pembangunan ekonomi daerah selama periode penelitian, meskipun pengaruhnya tidak bersifat langsung dalam jangka pendek.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa belanja modal pemerintah daerah memiliki peran dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo selama periode 2020–2024. Perkembangan belanja modal menunjukkan pola yang fluktuatif, mencerminkan dinamika kebijakan fiskal daerah dalam menghadapi proses penyesuaian dan pemulihan ekonomi. Di sisi lain, pembangunan ekonomi daerah yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menunjukkan tren peningkatan yang relatif konsisten selama periode penelitian.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah daerah memiliki hubungan yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Probolinggo pada taraf signifikansi 10 persen, dengan nilai koefisien determinasi yang cukup besar. Namun demikian, hubungan tersebut tidak menunjukkan pengaruh positif secara langsung dalam jangka pendek. Temuan ini mengindikasikan bahwa dampak belanja modal pemerintah daerah terhadap pembangunan ekonomi bersifat tidak instan dan cenderung memerlukan waktu untuk dapat dirasakan secara optimal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa belanja modal merupakan instrumen fiskal yang penting dalam pembangunan ekonomi daerah, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan belanja tersebut. Oleh karena itu, belanja modal perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi jangka menengah dan panjang, bukan semata-mata sebagai alat stimulus jangka pendek.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Probolinggo atas kesediaannya memberikan data yang diperlukan untuk mendukung analisis penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo atas ketersediaan data statistik yang menjadi dasar pengukuran pembangunan ekonomi daerah dalam penelitian ini. Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada dosen pembimbing dan civitas akademika Program Studi Ekonomi Universitas Nurul Jadid yang telah memberikan arahan, masukan, dan kritik konstruktif selama proses penyusunan penelitian. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada rekan-rekan yang telah memberikan dukungan moral dan diskusi ilmiah sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan guna penyempurnaan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Aschauer, D. A. (1989). Is public expenditure productive? *Journal of Monetary Economics*, 23(2), 177–200.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo. (2022). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Probolinggo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017–2021*. BPS Kabupaten Probolinggo.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Probolinggo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018–2022*. BPS Kabupaten Probolinggo.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo. (2024). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Probolinggo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019–2023*. BPS Kabupaten Probolinggo.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Probolinggo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020–2024*. BPS Kabupaten Probolinggo.
- Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. *Journal of Political Economy*, 98(5), S103–S125.
- BPKAD Kabupaten Probolinggo. (2025). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020–2024*. Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. G. (2020). *Macroeconomics* (10th ed.). New York: Worth Publishers.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94.
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Harlow: Pearson Education.